

**STUDI TENTANG MEKANISME PENYALURAN DANA BANTUAN
LANGSUNG SEMENTARA MASYARAKAT (BLSM) DI
KELURAHAN MUARA JAWA ILIR KECAMATAN
MUARA JAWA KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA**

Siti Noor Inayah

**eJournal Ilmu Administrasi Negara
Volume 4, Nomor 2, 2014**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : **Studi Tentang Mekanisme Penyaluran Dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) Di Kelurahan Muara Jawa Ilir Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara**

Pengarang : Siti Noor Inayah

NIM : 1002015146

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip Unmul.

Samarinda, 06 Agustus 2014

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Drs. H. M Gunthar Riady, M.Si
NIP. 19500607 197600 1 002

Drs. H. Burhanudin, M.Si
NIP. 19580123 198601 1001

Bagian di bawah ini
DIISI OLEH PROGRAM STUDI

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan : eJournal Administrasi Negara	KETUA PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
Volume : 4	
Nomor : 2	
Tahun : 2014	
Halaman : 1138 – 1147 (Ganjil)	<u>Drs. M.Z. Arifin, M.Si</u> NIP. 19570606 198203 1 001

STUDI TENTANG MEKANISME PENYALURAN DANA BANTUAN LANGSUNG SEMENTARA MASYARAKAT (BLSM) DI KELURAHAN MUARA JAWA ILIR KECAMATAN MUARA JAWA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Siti Noor Inayah¹

Abstrak

Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yaitu merupakan salah satu program kompensasi dari dampak kenaikan harga BBM. BLSM diberikan karena terjadi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM khususnya Premium dan Solar) bersubsidi. Kenaikkan harga BBM bersubsidi akan menstimulasi inflasi dan lebih lanjut, menurut Kurtubi, dapat menurunkan daya beli (purchasing power) masyarakat terhadap tingkat konsumsinya. Dalam proses penanganan BLSM yang meliputi beberapa tahap mulai dari Penerimaan Kartu Perlindungan Sosial, diwajibkan Membawa kartu Perlindungan Sosial dan kartu identitas, Pencocokan data pembayaran dengan kartu perlindungan sosial dan identitas pendukungnya, Perolehan manfaat dari program BLSM sesuai dengan jumlah yang ditentukan. Diantara tahapan-tahapan tersebut yang belum berjalan secara maksimal adalah Pencocokan data pembayaran dengan kartu perlindungan sosial dan identitas pendukungnya hal ini dikarenakan kurangnya penanganan yang ketat dalam proses pencocokan kartu. Selain itu Perolehan manfaat dari program BLSM yang belum cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta manfaat yang diterima tidak sesuai dengan sasaran pemerintah karena data penerima BLSM yang tidak valid.

Kata Kunci : *Mekanisme Penyaluran Dana BLSM, Kelurahan Muara Jawa Ilir*

¹Mahasiswa Program S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: inayah946@gmail.com

Pendahuluan

Latar Belakang

Masalah kemiskinan perkotaan dan pedesaan merupakan masalah yang selalu hangat dibicarakan di Indonesia maupun kota-kota di dunia, karena hampir semua kota menghadapi masalah kemiskinan. Semakin meningkatnya harga BBM maka semakin tinggi pula angka kemiskinan di Indonesia hingga mencapai 15,5 juta jiwa. Karena itu pemerintah membuat kebijakan berupa kompensasi kenaikan harga BBM.

Beberapa bagian perencanaan program pengendalian masalah Kemiskinan serta implementasinya telah dilaksanakan melalui penerbitan Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2013 tentang Sosialisasi Kebijakan Penyesuaian Harga Bahan Bakar Minyak dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Setelah 2 (dua) tahun implementasi Perda ini, angka kemiskinan di Kutai Kartanegara masih cukup tinggi (18,22%). Padahal alokasi anggaran dalam rangka pelaksanaan Perda ini ditetapkan minimal 0,5% dari total APBD Kutai Kartanegara, artinya setiap tahunnya selalu meningkat seiring dengan meningkatnya APBD.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap .Studi tentang mekanisme penyaluran dana BLSM di Kelurahan Muara Jawa Ilir Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan perumusan masalah sebagai berikut :

”Bagaimana mekanisme penyaluran dana BLSM di Kelurahan Muara Jawa Ilir Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara ?”

Tujuan Penelitian

Untuk mendeskripsikan proses penyaluran dana BLSM di Kelurahan Muara Jawa Ilir Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara ?

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis untuk memberikan kontribusi berupa gambaran penelitian yang ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari serta memberikan saran-saran dan manfaat bagi peneliti, pembaca, maupun Instansi terkait.
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai sumbangan pemikiran dan pertimbangan bagi instansi terkait, khususnya yang berhubungan dengan penerapan Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).
 - b. Sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang akan mengadakan penelitian selanjutnya terutama tentang penerapan Implementasi Kebijakan BLSM.

Kerangka Dasar Teori

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses atau serangkaian keputusan yang diterima oleh lembaga legislatif bisa dijalankan. Implementasi juga dapat diartikan dalam konteks keluaran atau sejauh mana tujuan-tujuan yang telah direncanakan mendapatkan dukungan, seperti tingkat pengeluaran belanja bagi suatu program.

Kebijakan Publik

Konsep kebijakan atau dalam bahasa Inggris sering kita dengar dengan istilah *policy*. Chaizi Nasucha (2004:37) mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang digunakan kedalam perangkat peraturan hukum.

Selanjutnya B.N Marbun (2003:263), kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dandasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dalam pemerintahan atau organisasi, pernyataan, cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman dalam mencapai tujuan.

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

Konsep Penyaluran BLSM

Menurut Panduan Sosialisasi Penyesuaian Bahan Bakar Minyak, 2013. Sosialisasi dan Implementasi Program-Program Kompensasi Kebijakan Penyesuaian Subsidi Bahan Bakar Minyak, yang dibuat berdasarkan Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2013.

- a. Penerimaan Kartu Perlindungan Sosial
- b. Membawa kartu Perlindungan Sosial dan kartu identitas
- c. Pencocokan data pembayaran dengan kartu perlindungan sosial dan identitas pendukungnya.
- d. Perolehan manfaat dari program BLSM sesuai dengan jumlah yang ditentukan.

Pengertian Kemiskinan

Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya

tabungan dan investasi, rendahnya investasi akan berakibat pada keterbelakangan dan seterusnya. Logika berpikir yang dikemukakan Nurkse yang dikutip Kuncoro (2000: 7) yang mengemukakan bahwa negara miskin itu miskin karena dia miskin (*a poor country is poor because it is poor*).

Kalangan pemerhati masalah kemiskinan telah mencoba memilih kemiskinan dalam empat bentuk, dimana masing-masing bentuk mempunyai arti sendiri. Keempat bentuk tersebut yaitu kemiskinan absolut, kemiskinan struktural, kemiskinan cultural, kemiskinan relatif.

1. Kemiskinan struktural adalah kondisi atau situasi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan.
2. Kemiskinan kultural karena mengacu kepada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha untuk memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif, meskipun ada usaha dari pihak luar untuk membantunya.
3. Kemiskinan absolut yaitu apabila tingkat pendapatannya dibawah “garis kemiskinan” atau sejumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi minimum, antara lain kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bias hidup dan bekerja.
4. Kemiskinan relatif adalah kondisi dimana pendapatannya berada pada posisi di atas garis kemiskinan, namun relatif lebih rendah disbanding pendapatan masyarakat sekitar.

Definisi Konsepsional

Berdasarkan teori-teori yang ada, maka didapat bahwa definisi konsepsional dari penelitian Mekanisme Penyaluran Dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) Di Kelurahan Muara Jawa Ilir Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kertanegara adalah kegiatan penanggulangan kemiskinan berdasarkan Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2013 Tentang Sosialisasi dan Penyesuaian Harga BBM yang sistematis oleh Pemerintah Daerah Khususnya Di Kelurahan Muara Jawa Ilir Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kertanegara agar dapat meringankan, membantu perekonomian dan beban masyarakat miskin dalam menghadapi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Metode Penelitian

Untuk mengetahui mekanisme penyaluran dana BLSM jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Moleong (2002:2) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang bersifat ilmiah, yang bergantung pada suatu pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri yang berhubungan dengan orang-orang, latar dan perilaku secara holistik (utuh). Metode penelitian kualitatif lebih mudah menyesuaikan dengan kondisi lapangan, lebih peka terhadap perubahan pola/nilai dan bahkan data yang ada di lapangan

Dalam penelitian ini yang menjadi acuan dalam analisis data digunakan analisis data model interaktif dari Matthew B. Milles dan Michael Huberman (2009:20) yang pelaksanaannya memiliki empat proses, yaitu:

1. Pengumpulan data
2. Reduksi data
3. Penyajian data
4. Penarikan kesimpulan.

Fokus Penelitian

Dari paparan di atas dan berdasarkan masalah yang diteliti serta tujuan penelitian maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Penerimaan Kartu Perlindungan Sosial
2. Membawa kartu Perlindungan Sosial dan kartu identitas
3. Pencocokan data pembayaran dengan kartu perlindungan sosial dan identitas pendukungnya.
4. Perolehan manfaat dari program BLSM sesuai dengan jumlah yang ditentukan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kelurahan Muara Jawa Ilir Kecamatan Muara Jawa khususnya pada RT 01, 02, 03, 06, 07. Kelurahan Muara Jawa Ilir ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 3119 jiwa yang terdiri dari 1.573 jumlah penduduk laki-laki dan 1.546 Jumlah penduduk Perempuan, dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 920 KK yang tersebar pada 11 Rukun Tetangga.

Profil Kelurahan Muara Jawa Ilir

Tugas Pokok Kelurahan Muara Jawa Ilir

Kelurahan Muara Jawa Ilir adalah wilayah kerja sebagai perangkat daerah Kabupaten Kota dan menjalankan kewenangannya sesuai yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas Daerah. Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Camat. memiliki Tugas Pokok Menurut Keputusan Walikota Samarinda No. 34 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas dan Tata Kerja Kantor Kecamatan dan Kelurahan Muara Jawa menyebutkan bahwa Lurah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat di wilayah Kelurahan.

Hasil Penelitian

Mekanisme Penyaluran dana BLSM di Kelurahan Muara Jawa Ilir Kecamatan Muara Jawa kabupaten Kutai Kartanegara

1. Penerimaan Kartu Perlindungan Sosial

Penerimaan Kartu Perlindungan Sosial yang dimaksud adalah kartu yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka Program Percepatan Perluasan perlindungan Sosial (P4S). Dengan memiliki KPS, rumah tangga berhak menerima program-program perlindungan sosial seperti Beras Miskin (RASKIN) , Bantuan Siswa Miskin (BSM), sesuai dengan ketentuan yang berlaku hingga tahun 2014. KPS memuat informasi Nama Kepala Rumah Tangga, Nama Pendamping Kepala Rumah Tangga, Nama Anggota Rumah Tangga, Alamat Rumah Tangga, dilengkapi dengan kode batang beserta nomor identitas KPS yang unik. Bagian depan bertuliskan Kartu Perlindungan Sosial dengan Logo burung Garuda

Penyaluran bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi kenaikan harga BBM diakui masih banyak kekurangan. Yang paling vital adalah salah sasaran. Pada penyaluran BLSM tahap pertama, masih ada orang mampu menerima bantuan ini. Sebaliknya, ada orang miskin yang berhak justru tidak menerima sama sekali. Tim Peneliti LPEM UI Bidang Kemiskinan mengatakan, hampir mustahil untuk mendapatkan kesempurnaan penyaluran BLSM. Namun, ini masih bisa diperbaiki pada penyaluran tahap berikutnya. Kesalahan penyaluran BLSM ini berawal dari kartu KPS (Kartu Perlindungan Sosial) yang diterima masyarakat.

Proses penyaluran bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) dinilai banyak kalangan tidak tepat sasaran, masih memungkinkan dibenahi. Penerima bantuan yang dianggap tidak layak, bisa diganti warga lain yang dinilai lebih berhak. Cara pengalihan penerima bantuan kompensasi kenaikan harga BBM tersebut, harus diawali dengan musyawarah di tingkat kelurahan. Yang bertujuan untuk menentukan penggantian penerima BLSM, dari satu warga kepada warga lain yang dianggap lebih layak.

Manfaat dari Kartu Perlindungan Sosial (KPS) itu sendiri untuk membantu memastikan agar rumah tangga miskin dan rentan dapat menerima manfaat dari semua Program Perlindungan Sosial yang berhak diterimanya sehingga membantu upaya rumah tangga untuk keluar dari kemiskinan. Sumber data Kartu Perlindungan Sosial ini adalah data Rumah Tangga Sasaran (RTS) bersumber dari Basis Data Terpadu (BDT) yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Pendataan RTS telah dilakukan sebanyak Tiga Kali oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu Pendataan Sosial Ekonomi (PSE), pada tahun 2005, Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) pada tahun 2008, dan yang terakhir PPLS tahun 2011.

Pemilik kartu menunjukkan KPS pada saat pengambilan manfaat Program Perlindungan Sosial, termasuk Program RASKIN, BSM, PKH, dan BLSM. Yang berhak memanfaatkan adalah mereka yang menjadi peserta BLSM

sesuai dengan aturan dan Kriteria yang ditentukan oleh unit Pengelola Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (UPBLSM-Kemensos). Pembagian Kartu BLSM di Kelurahan Muara Jawa Ilir hanya dilakukan oleh ketua RT tidak ada campur tangan lagi masalah pembagian kartu Kompensasi BLSM setelah pihak kantor POS mengantarkan kartu Kompensasi BLSM ke Kantor Kecamatan setelah itu Kasi Kesra dari kantor Kecamatan membagikan ke setiap Kelurahan yang ada di Kecamatan Muara Jawa setelah diantarkan ke Kelurahan masing-masing maka Kasi Kesra Kelurahan mengundang masing-masing RT untuk memberikan kartu Kompensasi BLSM tersebut dan dibagikan langsung kepada waraganya, dan bukan dari pihak Kantor POS yang membagikan Kartu Kompensasi BLSM tersebut melainkan ketua RT wilayah masing-masing.

2. Jadwal Pencairan Dana Kompensasi BBM

Proses pencairan dana Bantuan Dana Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) merupakan arahan pemerintah pusat. Tingginya angka penerima BLSM membuat pihak kantor POS menyusun jadwal khusus. Ini dilakukan, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saat pendistribusian. Dari kegiatan BLSM tersebut pemerintah kembali membagi dua sesi, pendistribusian awal dilakukan untuk dua bulan dengan nominal Rp. 300 ribu. Untuk mendapatkan BLSM, masyarakat harus membawa kartu BLSM dan kartu identitas diri.

Jadwal pencairan yang dilakukan sudah dilakukan sesuai dengan perintah yang ada dari pemerintah namun karena kurangnya sosialisasi jadi warga masih banyak yang kurang mengetahui tentang BLSM ini yang mereka ketahui hanyalah mendapatkan kartu, datang ke Kecamatan, antri dan mengambil uang tersebut. Bahkan ada warga yang tidak mengetahui jadwal atau uang BLSM ini dana dari mana karena beliau hanya mewakili adik beliau yang sudah meninggal 2 tahun, hal ini bisa terjadi dikarenakan tidak adanya sosialisasi kepada warga dan tidak adanya pendataan ulang untuk perubahan data warga yang sudah meninggal dunia.

3. Proses Pencocokan Data dan Pencairan Dana

Sejalan dengan pencabutan subsidi tersebut pemerintah telah mencanangkan program BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat) dalam bentuk uang tunai sebesar 150ribu rupiah guna diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu melalui Pemerintah Daerah. Namun, tidak sedikit kalangan menilai bahwa BLSM bukanlah solusi yang tepat untuk meringankan beban masyarakat, selain nilainya yang kecil juga permasalahan soal data penerima BLSM yang terkadang kurang tepat, sehingga yang seharusnya menerima lantas tidak menerima karena data yang tidak cocok.

Proses Pencocokan data yang ada di Kelurahan Muara Jawa Ilir sudah sesuai dengan yang diperintahkan yaitu untuk kelengkapan administrasi warga di Kelurahan Muara Jawa Ilir harus membawa KTP dan KK untuk pencocokan data apabila ada warga yang tidak membawa maka tidak akan menerima Dana Kompensasi BLSM tersebut. Untuk pencairan dana tersebut dilakukan di Kantor

Kecamatan Muara Jawa namun untuk yang membagikan tetap dari pihak PT. POS Indonesia (Persero), namun dari warga banyak yang tidak mengetahui siapa yang membagikan uang tersebut yang terpenting bagi warga hanyalah bisa mengambil dana BLSM tersebut tanpa hal-hal yang dapat mempersulit warga untuk pengambilan.

4. Manfaat Program BLSM

Pemerintah menyiapkan kebijakan itu sebagai respon terhadap dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) palagi pengalaman tahun 2005,2008, 2009 terbukti dapat membantu masyarakat yang kondisi sosialnya rendah. Namun kebijakan itu harus memberikan manfaat yang optimal guna masyarakat miskin agar mereka tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, dan mencegah penurunan taraf kehidupannya akibat kesulitan ekonomi sebagai tanggung jawab sosial kita bersama.

Ketentuan BLSM itu, memang ditentukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang telah melakukan Program Pendataan Perlindungan Soisial (PPLS) pada tahun 2011. Namun data tersebut masih dikirim ke pemerintah pusat dan penerima bantuan itu langsung dikirim pemerintah pusat melalui PT. POS Indonesia. Jadi, secara teknis kuota penerimanya langsung dari pusat. Untuk masyarakat miskin yang merasa berhak, dan tidak mendapat bantuan BLSM tersebut, maka warga yang bersangkutan bisa melaporkan keunsur pemerintah setempat untuk dikirim kepusat. Dan setelah melaporkannya, maka unsure pemerintah setempat untuk dikirimkan ke pusat. Setelah melaporkannya, maka unsure pemerintah akan memberikan surat keterangan miskin, namun untuk mendapatkan BLSM warga masih menunggu kartu dari pusat.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, diperoleh kesimpulan bahwa :

1. Kartu yang diberikan oleh pemerintah sebagai salah satu syarat pengambilan dana BLSM sudah dilakukan dengan baik dan diberikan langsung oleh Ketua RT setempat kerumah warganya masing-masing, namun masih saja ada warga yang sudah meninggal yang mendapatkan Karu BLSM tersebut yang diterima oleh pihak keluarga penerima.
2. Jadwal Pencairan yang diberikan masih banyak tidak diketahui oleh warganya karena tidak ada sosialisasi sebelumnya hanya berupa pemberitahuan secara langsung yang dilakukan Ketua RT pada saat membagikan kartu.
3. Pencocokan kartu dilakukan dari pihak luar Kecamatan Muara Jawa dan kartu yang di cocokkan adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Perlindungngan Sosial (KPS) serta Kartu Keluarga. Hal ini dilakukan karena setiap masyarakat wajib untuk mengambil dana BLSM sendiri, tanpa diwakilkan. Apabila diwakilkan harus ada surat kuasa yang ditandatangani

oleh pihak yang berhak kepada yang dikuasakan serta tandangan dan stempel dari Kelurahan dan Ketua RT.

4. Dana BLSM ini bermanfaat bagi masyarakat kecil walaupun sifatnya hanya sementara. namun masyarakat sangat setuju akan adanya dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) ini karena sangat membantu mereka yang memang sangat membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penyaluran dana BLSM masih banyak yang tidak tepat sasaran karena data yang tidak sesuai dengan fakta dimasyarakat. Hal ini disebabkan karena data yang digunakan oleh pemerintah dari tahun 2005 hingga sekarang merupakan merupakan data yang sama dan belum pernah ada pendataan ulang.

Saran

Sesuai dengan kesimpulan diatas, penulis dapat memberikan saran yang terkait dengan penelitian ini :

1. Diharapkan Ketua RT dapat memiliki peran yang lebih mendalam terkait penerimaan kartu BLSM ini dan melaporkan setiap penerima kartu yang sudah pindah ataupun meninggal.
2. Diharapkan kepada pemerintah agar dapat melakukan sosialisasi yang lebih intens dan lebih mendalam terkait BLSM dan jadwal pengambilan dana BLSM yang dilakukan di Kantor Kecamatan yang dilaksanakan terkait BLSM dan jadwal pengambilan dana BLSM yang dilakukan di Kantor Kecamatan.
3. Diharapkan kinerja pemerintah atau instansi yang terkait dalam pencocokkan BLSM dapat lebih baik dari sebelumnya agar penerima BLSM tersebut dapat mengikuti aturan yang ada pada saat pencocokan kartu.
4. Sebaiknya pemerintah menciptakan program kerja untuk rakyat seperti pelatihan menjahit atau pemberian modal untuk program kerja positif lainnya agar masyarakat yang mengikuti program tersebut dapat membuka usaha kecil dirumah mereka, dengan begitu masyarakat yang menerima BLSM dapat sedikit mengurangi beban kehidupan mereka dan menaikkan taraf hidup masyarakat tersebut menjadi lebih baik sehingga tidak tergantung pada pemberian BLSM. Karena apabila hanya berharap dari BLSM yang sifatnya hanya sementara, sewaktu-waktu apabila dana BLSM tersebut dicabut oleh pemerintah maka naisb masyarakat miskin akan tetap sama seperti sebelumnya, dengan adanya kegiatan program kerja yang diadakan oleh pemerintah. Dan sebaiknya pembagian BLSM ini dilakukan pendataan ulang setiap tahunnya serta dilakukan langsung oleh pihak RT yang lebih mengetahui kondisi warganya karena data yang sekarang digunakan masih menggunakan data penerima BLSM tahun 2005, hal ini dilakukan agar dana BLSM tidak salah sasaran dan memang digukan oleh warga yang sangat membutuhkan.

Daftar Pustaka

- Abidin, Said Zainal. 2004. *Kebijakan Public*. Jakarta. Pancur siwah.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Penerbit Afabeta, Bandung.
- Hamongan. Ritonga. M. sc. Dr. 2003. *Perhitungan Penduduk Miskin*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Hastuti, Syaikh Usman, Bambang Sulaksono, Sulton Mawardi, dan Muhammad Syukri, 2013. *Pemantauan Cepat Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM)*, Lembaga Penelitian Semeru, Jakarta.
- Islamy, Irfan. 2003. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Marbun B.N, 2003. *Kamus Politik*. Sinar Harapan : Jakarta
- Mardalis, 2003. *Metode Penelitian* (Suatu Pendekatan Proposal). Jakarta : Bumi Aksara.
- Milles, Mathew & Huberman, Michael. 2009. *Analisis Data Kualitatif* (Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru) Jakarta : Universitas Indonesia.
- Moleng, Lexy. J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Nasucha, Chaizi. 2004. *Reformasi Administrasi Publik* (Teori dan Praktik), Jakarta : Gramedia
- Nawawi, Hadari, 2003, *Metode Penelitian Sosial, Bidang Sosial*. Yogyakarta, Gajah Mada University Press.
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*, Bandung : Alfabeta.
- Sarwono, Sarlito Wirawan (2005). *Psikologi Sosial*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soemarjan, Selo. 2003. *Menyusun Liku-Liku Pendataan Keluarga*. Jakarta: BKKBN
- Subarsono AG, MA, M.Si,DRS. 2005, *Analisis Kebijakan Publik*, Pustaka Belajar, Yogyakarta
- Sugiyono, 2006. *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.
- Suharto, Edi (2009). *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri*. Bandung : Alfabeta.
- Wahab, Solichin Abdul. 2001. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Winarno, Budi.2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*.Yogyakarta : CAPS

Dokumen-Dokumen

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Fakir Miskin.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang No.39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual dan
Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu

Intruksi Presiden No.5 Tahun 2013 Tentang Sosialisasi Penyesuaian Subsidi
BBM

Intruksi Mendagri No.541/3150/SJ tentang Pembagian Kartu Perlindungan
Sosial (KPS) dan Penanganan Pengaduan masyarakat.

Sumber Internet

https://id-id.Facebook.com/permalink.php?story_fbid= : tanggal akses (28
November 2013)

[http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/infosingkat/info%20singkat-V-13-1-
P3DI-Juli-20013-79.pdf](http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/infosingkat/info%20singkat-V-13-1-P3DI-Juli-20013-79.pdf) : tanggal akses (8 Desember 2013)

http://id.wikipedia.org/wiki/Bantuan_Langsung_Sementara_Masyarakat : tanggal
akses 8 Desember 2013